

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbedaan hasil pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan, kesejahteraan yang tidak merata mengakibatkan disparitas ekonomi. Lebih lanjut lagi, hal ini berdampak pada tingkat kemiskinan dan pengangguran lebih tinggi pada daerah pedesaan daripada dalam perkotaan. Menyadari hal ini, saat ini pemerintah telah memulai berfokus pada wilayah pedesaan. Sejumlah inisiatif telah diperkenalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan perkembangan dan kemandirian desa-desa, seperti melalui anggaran Desa (Mualifah & Prasetyoningrum, 2021).

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh desa dengan sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki desa dan dikelola oleh desa yang kemudian hasilnya untuk kesejahteraan desa. BUMDes sendiri menjadi sebuah terobosan bagi setiap desa untuk terus berinovasi dalam meningkatkan PADes atau pendapatan asli desa. Pembentukan BUMDes juga berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, keberagaman, partisipasi, dan demokrasi. Prinsip-prinsip dalam BUMDes digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemberdayaan di Desa yang membutuhkan peran serta dari masyarakat untuk menjalankan Desa yang maju dan berkesinambungan. BUMDes juga didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah Desa berdasarkan musyawarah mufakat warga desa dengan mempertimbangkan potensi usaha

ekonomi desa, unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif (<https://desabatuah.com>, 2024).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri dari musyawarah Desa / musyawarah antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Selain itu, kegiatan BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan layanan yang mendorong pertumbuhan ekonomi baik bagi individu maupun komunitas desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengembangan destinasi pariwisata saat ini terdapat 102 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah terbentuk. Menurut data dari Sistem Informasi Desa (SID) Kemendes, sebanyak 74 Badan Usaha Milik Desa telah memiliki status hukum yang sah, sementara 22 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih dalam proses perizinan dan 6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum memiliki status hukum yang jelas. Alternatif yang digunakan untuk mendorong perkembangan usaha di berbagai Desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan melalui beberapa proses pendataan dan klasifikasi. Dimana berdasarkan tingkat perkembangan, yaitu dasar, tumbuh, berkembang, dan maju. Langkah selanjutnya yaitu melakukan revitalisasi baik dalam aspek kelembagaan maupun pengembangan usaha. Berdasarkan Pergub Jateng Nomor 18/2018, klasifikasi dan pemeringkatan dari 102 Desa yang terlibat menunjukkan bahwa terdapat 2 Desa yang berstatus maju, 3 Desa yang berkembang, 24 Desa yang tumbuh, 38 Desa besar, dan 35 Desa lainnya belum melakukan klasifikasi (Radar Kudus Jawa Pos, 2022).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja badan usaha milik Desa (BUMDes). Sebanyak 362 BUMDes di tanah air menjadi sampel pengamatan. Anggota tim sosialisasi pengelolaan BUMDes dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah menyampaikan, hasil dari pengamatan tersebut menemukan penyebab pengelolaan BUMDes yang tidak efektif. Penyebab utama dalam masalah ini adalah kurangnya semangat dari masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Dimana sebagian di antara BUMDes itu belum berbadan hukum sehingga sulit mengakses permodalan dari Lembaga Perbankan. Faktor perencanaan bisnis dan pengembangan potensi desa juga masih menjadi titik lemah dikarenakan belum bisa mengembangkan sumber daya khas Desa menjadi usaha produktif. Selain itu, para pengelola juga merasa kesulitan melakukan pemasaran, karena tidak mampu bersinergi dengan pihak ketiga. Sehingga, seringkali produk hanya laku di pasar lokal. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai ketentuan juga masih menjadi PR para pengelola BUMDes. Bertolak dari kondisi itulah, sambil menyiapkan waktu untuk melakukan sosialisasi pengelolaan BUMDes, agar kinerja BUMDes dapat meningkat dan mendukung Pendapatan Asli Desa (jatengprov.go.id 2024).

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk menumbuhkan suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Dimana ketika pertumbuhan ekonomi baik di sebuah Desa maka begitu pula pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di pengaruhi dari bagaimana ekonomi pedesaan dibangun sehingga akan berdampak kepada semua sektor. Berdirinya BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan hidup Masyarakat Desa. BUMDes sendiri memiliki beberapa klasifikasi jenis usaha sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Tipe	Deskripsi	Contoh
<i>Serving</i>	BUMDes menjalankan bisnis sosial yang melayani warga yakni dapat melakukan pelayanan public kepada Masyarakat. Dengan kalimat lain. BUMDes ini memberikan sosial benefit kepada warga meskipun tidak memperoleh ekonomi profit yang besar.	Usaha air minum desa, usaha Listrik desa, lubang pangan.
<i>Banking</i>	BUMDes menjalankan bisnis uang, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah dari bank-bank konvensional.	Bank Desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.
<i>Rental</i>	BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.	Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dll.
<i>Brokering</i>	BUMDes menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha Masyarakat.	Jasa pembayaran listrik desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.
<i>Trading</i>	BUMDes menjalankan bisnis yang berproduksi dan berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun di pasarkan di skala pasar yang lebih luas.	Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, dan lain lain
<i> Holding</i>	BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa. Dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha Bersama.	Kepala desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil. Desa wisata yang mengorganisi berbagai jenis usaha dari kelompok Masyarakat : nakanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dll.

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia 2015.

BUMDes memiliki peran yang penting bagi perekonomian pemerintahan desa, apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi desa. Sebagai entitas bisnis yang dimiliki oleh publik, tata kelola

BUMDes juga tunduk pada beberapa prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan tata pemerintahan yang baik (*good government governance*). Prinsip-prinsip tata kelola BUMDes yang baik, antara lain : adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik (kooperatif), keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes (partisipatif), keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama (emansipatif), seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut (transparan), keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan (*akuntabel*), masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes (*sustainabel*) (Syam et al., 2020).

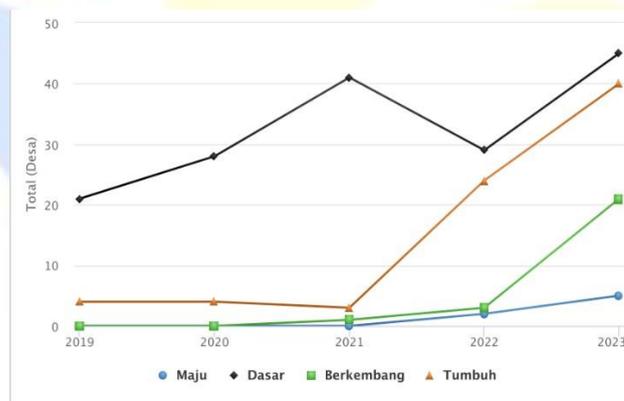
Spirit kewirausahaan merupakan dorongan pada seseorang yang kreatif dan penuh inovasi untuk mengembangkan sebuah usaha (Iswari et al., 2022). Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) harus memiliki spirit kewirausahaan agar pengelolaan usahanya berjalan dengan baik dan menghasilkan banyak keuntungan berupa laba bersih (Haji et al., 2022). Permasalahan utama dalam pengelolaan BUMDes berupa kurangnya dorongan dalam memulai usaha dan mengembangkan usahanya dikarenakan besarnya kekhawatiran akan gagalnya usaha, kurangnya dukungan pihak-pihak terkait, kurangnya wawasan kewirausahaan, dan kurangnya fasilitas literasi (Iswari et al., 2022).

Pengalaman adalah proses pembentukan kecerdasan yang terjadi melalui interaksi individu dengan objek dan orang lain di lingkungan sekitarnya (www.rspatriaikkt.co.id). Pengalaman pengelolaan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja suatu BUMDes, pengetahuan yang tinggi tanpa disertai dengan pengalaman yang baik, akan sangat memengaruhi pengelolaan pada BUMDes. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan usaha, pada dasarnya pengambilan keputusan di BUMDes dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan rapat dengan semua pemangku kepentingan. Hanya saja, Pemerintah Desa seringkali lebih dominan dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pengurus BUMDes (Pakamundi, 2022).

Minat berwirausaha merupakan dorongan batin yang harus dimiliki pada seseorang yang penuh keberanian dan tekad pada menciptakan suatu pada bisnis dengan menggunakan gagasan-gagasan kreatifitas dan inovatif (Yunus et al., 2020). Minat warga desa dalam berwirausaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu berasal dari dalam maupun dari mereka sendiri (internal) maupun faktor yang berasal dari luar diri (eksternal). Ketersediaan sumber dana berkaitan dengan cara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendapatkan modal usaha berupa uang, peralatan, dan sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan produk maupun jasa. Kemudahan maupun kesulitan dalam memperoleh modal dapat berdampak pada ketersediaan dana yang mereka miliki (Mualifah & Prasetyoningrum, 2021).

Motivasi berwirausaha adalah dorongan yang berkaitan dengan individu seorang wirausaha, seperti sikap pantang menyerah, ulet, dan semangat. Motivasi usaha yang memadai akan mendorong untuk berperilaku aktif dalam berwirausaha (Harie & Andayanti, 2020). Pencapaian standar kerja yang baik dalam suatu organisasi dipengaruhi

oleh partisipasi SDM di dalamnya. Motivasi untuk bekerja sangat penting dalam pencapaian suatu organisasi, serta tinggi dan rendahnya produktivitas. Kurangnya pemahaman dan edukasi dari Pemerintah Desa terhadap kemampuan warga membuat motivasi berwirausaha kurang maksimal. Pengelola yang tidak termotivasi dalam bekerja sama demi kepentingan BUMDes akan berdampak pada gagalnya pencapaian tujuan (Utami & Mayasari, 2021).



Gambar 1. 1 Kumpulan Data Klasifikasi BUMDes di Jawa Tengah

Sumber: SIDesa Jawa Tengah (2023)

Berdasarkan kumpulan data klasifikasi BUMDes diatas terus mengalami peningkatan yang sangat baik dari tahun 2019-2023. Dari tingkat kemajuan terus meningkat yang semula pada tahun 2019 tidak ada progress atau 0 (nol) kemajuan dan pada tahun 2023 berjumlah 5. Pada dasar awal pun selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 berjumlah 21 dan pada tahun 2023 berjumlah 45. Selain itu, perkembangan BUMDes pun sangat baik dari 2019 yang tidak ada perkembangan dan pada tahun 2023 berjumlah 21. Disisi lain, pertumbuhan juga sangat baik dari 2019 berjumlah 4 dan pada tahun 2023 berjumlah 40. Berdasarkan data diatas BUMDes terus mengalami kemajuan yang sangat baik.



Gambar 1. 2 Jumlah BUMDes Kabupaten Kudus 2023

Sumber : Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan jumlah BUMDes Kabupaten Kudus yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2019 tercatat 32 BUMDes, kemudian jumlahnya meningkat menjadi 45 BUMDes pada tahun berikutnya. Pada tahun 2021, jumlahnya bertambah lagi menjadi 67 BUMDes, dan pada tahun 2022 jumlahnya kembali meningkat menjadi 86 BUMDes. Hal tersebut dikarenakan pendirian BUMDes hanya menjadi sebuah formalitas bagi desa untuk memperoleh dana Provinsi. Banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan keberlanjutan pengelolaan BUMDes yang proses pertumbuhannya lambat disebabkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai, tidak terarahnya jenis usaha BUMDes dan perencanaan usaha BUMDes yang kurang matang hal tersebut oleh Eva Lina, S.E selaku pendamping dari Desa Lestari dalam kegiatan Pelatihan Dasar BUMDes ke 10. Terkait jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes yang bervariasi dan disesuaikan dengan potensi lokal pada masing-masing

desa, contohnya yaitu dari desa Gondosari terlibat pada pengelolaan sampah dari rumah ke rumah penduduk yang kemudian diberikan tugas untuk mengolah sampah tersebut menjadi produk yang lebih bermanfaat (desalestari.com) 2024.

Studi ini didasari oleh pemahaman bahwa perkembangan BUMDes memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di Kabupaten Kudus. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat berwirausaha pada pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) di Kabupaten Kudus. Hal ini yang mendasari penelitian mengenai pengaruh spirit kewirausahaan, pengalaman dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha dengan berwirausaha (studi pada BUMDes di Kabupaten Kudus).

Research gap dalam penelitian ini yaitu: penelitian yang telah dilakukan Ayunda *et al.* (2023) didapatkan hasil bahwa motivasi berwirausaha tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2022) didapatkan hasil bahwa motivasi berwirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Kristanto (2020) didapatkan hasil bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Falah & Marlina (2022) didapatkan hasil bahwa Pengalaman prakerin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Hasil penelitian yang tidak konsisten dari beberapa peneliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh spirit kewirausahaan, pengalaman dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha.

Berdasarkan latar belakang diatas dan dengan adanya *research gap*, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha. Adapun judul penelitian yang akan peneliti angkat adalah **“Pengaruh Spirit Kewirausahaan, Pengalaman, dan Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat Berwirausaha (Studi Pada BUMDes di Kabupaten Kudus)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini harus sesuai pencapaian, sehingga tolak ukur batasannya yang diterapkan sebagai berikut :

1. Variabel independen pada penelitian ini yaitu Spirit Kewirausahaan (X_1), Pengalaman (X_2) dan Motivasi Berwirausaha (X_3).
2. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Minat Berwirausaha (Y).
3. Objek dalam penelitian ini yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kudus.
4. Responden yang diteliti yaitu pengurus BUMDes di Kabupaten Kudus dengan total keseluruhan 74 BUMDes.
5. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan setelah proposal disetujui.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diketahui adanya permasalahan mengenai pengelolaan pada BUMDes di Kabupaten Kudus yang didukung oleh beberapa permasalahan pada variabel penelitian sebagai berikut :

1. Kurang efektifnya pengelolaan BUMDes dikarenakan pengelolaannya masih kurang dorongan semangat yang dilandasi beberapa faktor mengenai kualitas SDM.
2. Kurangnya pengalaman dan pemahaman masyarakat terhadap BUMDes dikarenakan pengelolaan yang didominasi pemerintah Desa tanpa mengikut sertakan tanpa melibatkan Masyarakat mengakibatkan kurangnya partisipasi Masyarakat dalam dilaksanakan BUMDes.
3. Kurangnya kepercayaan pemerintah desa dalam memberikan edukasi kepada warga agar termotivasi untuk mengelola BUMDes
4. Kurangnya pemahaman warga desa terkait sumber pendanaan pada BUMDes yang menyebabkan warga desa takut untuk turut serta dalam pengelolaan..

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh spirit kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada BUMDes di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pengaruh pengalaman terhadap minat berwirausaha pada BUMDes di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana pengaruh motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha pada BUMDes di Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana pengaruh sprit kewirausahaan, pengalaman dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha pada BUMDes di Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh spirit kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada BUMDes di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman terhadap minat berwirausaha pada BUMDes di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha pada BUMDes di Kabupaten Kudus.
4. Untuk menganalisis pengaruh sprit kewirausahaan, pengalaman dan motivasi berwirausaha pada BUMDes di Kabupaten Kudus.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan memberikan masukan sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang manajemen.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh spirit kewirausahaan, pengalaman dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha. Sehingga bisa memberikan kontribusi berupa informasi dan menjadi masukan bagi pengelola terkait faktor yang berpotensi mempengaruhi BUMDes.